

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Disusun Oleh :

Dian Anggraheni Widyaningrum

NIM : C 100 060 049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana budaya dalam masyarakat juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah dunia perbankan, dimana masyarakat sudah semakin mengenal kartu kredit. Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan, dan bahkan sering sangat bergantung pada aktivitas dan jasa perbankan.¹

Kartu kredit merupakan produk perbankan yang bertujuan memberi kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik dengan bank penerbit kartu kredit itu sendiri maupun dengan beberapa *merchant*. Merchant

¹ Barda Nawawi Arif. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. hal 51

adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima kartu kredit sebagai media pembayaran.² Dibandingkan dengan transaksi tunai, kelebihan menggunakan transaksi kartu kredit jauh lebih aman, dapat dihindarkan resiko transaksi uang palsu. Kartu kredit lebih efisien karena dengan sehelai kartu plastik bisa membawa nominal uang yang cukup banyak. Hal itu menjadi pilihan yang amat menguntungkan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi barang dan jasa yang menyebabkan pemakaian kartu kredit berkembang cukup pesat.

Kecanggihan teknologi semakin menyediakan banyak kemudahan bagi penggunanya, maka sistem teknologi itu semakin beresiko mendapatkan serangan. Dalam beberapa hal, ungkapan itu ada benarnya, terutama jika pengembangan teknologi itu tidak disertai dengan ketelitian dalam menguji sistem keamanan dan mengabaikan aspek perilaku serta budaya penggunanya.

Praktik perdagangan di internet dengan modus kartu kredit adalah salah satu contohnya. Di satu sisi, perdagangan di internet membuat orang lebih mudah dalam bertransaksi. Karena tidak perlu beranjak dari komputer untuk memesan atau berbelanja barang. Tinggal lihat produk atau jasa yang ditawarkan, lalu pilih yang akan dibeli, dan bayar dengan cara memasukan data kartu kredit. Barang akan langsung dikirim kepada pemesan, sangat mudah proses bertransaksinya. Aktivitas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata sangat jauh, namun dalam dunia maya menjadi seolah-olah dunia itu dekat.

² Flory Santosa. 2009. *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*. Jakarta: Forum Sahabat. hal 20

Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan kartu kredit tersebut, timbul penyalahgunaan dengan berbagai modus operandi yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi perbankan khususnya penerbit, tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit. Celah yang paling jelas tersedia dari kemudahan yang disediakan ini adalah tidak adanya tatap muka antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini. Celah bertindak kriminal semakin terbuka lebar jika si pelaku mengerti prinsip dasar kerja teknologi informasi. Celah macam inilah yang juga dimanfaatkan para pelaku tindak pidana dalam aksinya di internet.

Penyalahgunaan kartu kredit yang makin ekstensif dengan tunjangan kemajuan iptek di bidang telekomunikasi, tidak hanya berskala nasional tetapi juga regional dan internasional. Padahal pelaku kejahatan pengguna kartu kredit merupakan orang-orang terdidik maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dewasa ini kasus pemalsuan sedang marak terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan kartu debit sehingga merugikan bank yang bersangkutan hingga milyaran rupiah, begitu pula dengan kartu kredit. Terdapat beberapa bank yang kartu kreditnya dipalsukan antara lain City Bank, Bank Lippo, BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, Bank Danamon, BRI dan beberapa bank besar lainnya. Manajemen yang menyatakan semula kerugiannya hanya Rp. 1 Miliar dan kemudian dikoreksi menjadi Rp. 35 Miliar jelas diragukan kebenarannya karena pemalsuan tersebut terjadi dalam skala yang sangat

besar.³ Bank Indonesia mencatat jumlah kasus penipuan dan pemalsuan kartu kredit di Indonesia selama Januari-Oktober 2009 mencapai 7.654 kasus.⁴

Dengan berkembangnya modus kejahatan kartu kredit saat ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan kartu kredit masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan kartu kredit, sehingga memang perlu dibuat Undang-undang untuk menangani kejahatan kartu kredit, agar penegak hukum memiliki pedoman untuk menjerat pelaku di Pengadilan dengan hukuman yang seberat-beratnya, sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh pelaku.

Dari uraian mengenai kejahatan kartu kredit di Indonesia di atas, maka perlu penanganan yang serius melalui pemberian sanksi pidana yang jelas dasar hukumnya dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti serta menyusun skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**.

B. Pembatasan Masalah

Dengan maksud agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan, tidak salah sasaran dan mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan

³ Sinar Harapan, Kamis, 28 Februari 2008, <http://www.google.com///G:/sho7.html>, Diakses 26 Januari 2010 14.16

⁴ Green Citizen Indonesia, 20 Desember 2009, Fraud Kartu Kredit Januari-Oktober 2009 capai 7.654 kasus, dalam <http://file:///G:/fraud-kartu-kredit-januari-oktober-2009.html> Diakses 3 Maret 2010 19.47

pembatasan. Dalam pembahasan ini penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pengertian penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit dan sanksi apa yang diberikan pada orang yang dianggap melakukan penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
2. Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit?
2. Bagaimana aspek hukum pidana dalam penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit?
3. Bagaimana penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit oleh Pengadilan Negeri Surakarta?
4. Apa hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam penelitian khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
- b) Untuk memperoleh data-data yang akan digunakan penulis untuk menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui karakteristik penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
- b) Untuk mengetahui aspek hukum pidana dalam penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
- c) Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.
- d) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah bahan referensi karya ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

F. Kerangka Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental, Negara mengandung sistem hukum. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak

pidana atau kejahatan di masyarakat. Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.⁵

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya yang mengenai diri pribadi, rasa, dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.⁶ Maka dari itu sebagai negara hukum tentu mempunyai kewajiban untuk mengawasi dalam penegakan hukumnya, misalnya mengenai pencegahan tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan kartu kredit.

Menurut *Expert Dictionary*, kartu kredit didefinisikan sebagai “Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk memungkinkan pembawaanya membeli barang-barang secara hutang.”⁷ Sementara dalam kamus ekonomi Arab menjelaskan bahwa “Kartu kredit adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak Bank sebagai pengeluaran kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya rekening

⁵ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. hal. 160-161

⁶ Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal 30

⁷ Aya, Juni 2009, *Konsultasi Keuangan Anda dengan Aya*, dalam <http://www.google.com ///G:/pengertian-dan-kegunaan-kartu-kredit.html> Diakses 26 Januari 2010 14:07

bulanan secara global untuk dibayar atau langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.”⁸

Yang dimaksud kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dalam Pasal 1 butir 11, *“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”*.

Dewasa ini kasus pemalsuan sedang marak terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan kartu debit sehingga merugikan bank yang bersangkutan hingga milyaran rupiah, begitu pula dengan kartu kredit. Terdapat beberapa bank yang kartu kreditnya dipalsukan antara lain City Bank, Bank Lippo, BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Permata, Bank Danamon, BRI dan beberapa bank besar lainnya. Manajemen yang menyatakan semula kerugiannya hanya Rp. 1 Miliar dan kemudian dikoreksi menjadi Rp. 35 Miliar jelas diragukan kebenarannya karena pemalsuan tersebut terjadi dalam skala yang sangat besar.⁹ Bank Indonesia mencatat jumlah kasus penipuan dan pemalsuan kartu kredit di Indonesia selama Januari-Oktober 2009 mencapai 7.654 kasus.¹⁰

⁸ *Ibid.* hal 1

⁹ Sinar Harapan, Kamis, 28 Februari 2008, <http://www.google.com///G:/sho7.html>, Diakses 26 Januari 2010 14.16

¹⁰ Green Citizen Indonesia, 20 Desember 2009, Fraud Kartu Kredit Januari-Oktober 2009 capai 7.654 kasus, dalam <http://file:///G:/fraud-kartu-kredit-januari-oktober-2009.html> Diakses 3 Maret 2010 19.47

Penggunaan kartu kredit mulai di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tanggal 20 Desember 1988, di mana bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.¹¹ Saat ini yang berhak untuk menerbitkan kartu kredit di Indonesia adalah lembaga keuangan resmi seperti Bank. Masing-masing penerbit memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk jenisnya sendiri adalah:¹²

1. PLATINUM (Limit paling tinggi s.d tidak terbatas)
2. GOLD (Limit menengah s.d tinggi)
3. SILVER (Limit rendah s.d menengah)
4. KHUSUS seperti Golf Card, Manchester United Card dll

Kartu kredit mempunyai beberapa kegunaan antara lain:¹³

- Sebagai alat ganti pembayaran
- Sebagai cadangan
- Membantu melakukan pembayaran atas rekening rumah tangga

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, di antaranya dengan menggunakan kartu kredit.¹⁴ Dengan banyaknya kemudahan dari penggunaan

¹¹ Johannes Ibrahim. 2004. *Kartu Kredit Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama. hal 13

¹² Arc 27. On 11.11. Sejarah Pengertian Kartu Kredit. <http://www.google.com///G:/sejarah-dan-pengertian-kartu-kredit.html> Diakses 26 Januari 2010 14.06

¹³ Aya, Juni 2009, *Op Cit*. hal 1

¹⁴ Johannes Ibrahim. *Op. Cit*. hal 83

kartu kredit ini maka tidak sedikit orang yang memanfaatkannya, terlebih lagi dengan semakin maju dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan orang mencari jalan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain hanya untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini sanksi seperti apa yang dapat membuat jera pelakunya serta bagaimana penyelesaian kasus tersebut dalam pengadilan. Dari sini akan diteliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apa karakteristiknya dan apakah sanksi itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

G. Metode Penelitian

Dalam terlaksananya penelitian ini dengan lancar, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang secara teknis membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai peranan dalam penelitian adalah sebagai berikut :¹⁵

- Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
- Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
- Memberikan kemungkinan yang untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. hal 15

- Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Dengan demikian metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normative/yuridis kasus kasus penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit dan penerapannya dalam penyelesaian penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak".¹⁶ Melalui penelitian diskripsi ini ingin diperoleh gambaran yang selengkap-lengkapnya mengenai penyalagunaan dan pemalsuan kartu kredit di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah

¹⁶ Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hal 23

beberapa kali menyidangkan kasus penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit dan Bank yang terkait.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan, juga dari virtual internet yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Di sini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden terutama para informasi yang banyak

mengetahui tentang masalah-masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Pejabat Perbankan dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) tipe wawancara ini juga disebut wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak terstruktur. Cirinya yang utama adalah bahwa seluruh wawancara tidak berdasarkan pada suatu system atau daftar pertanyaan yang disusun lebih dahulu.¹⁷

b. Studi Kepustakaan

Yaitu satu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur dan sistematis.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. hal 59

¹⁸ Hilman Hadikusuma. 1985. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hal 10

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI. hal 15

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

H. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi tinjauan umum mengenai perbankan, tinjauan umum mengenai kartu kredit, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana tertentu, tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana.

BAB III memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas tentang karakteristik penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit, aspek hukum pidana dalam penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit, penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dan hambatan-

hambatan dalam penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

BAB IV memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN